

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan nasional. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan melalui program bantuan sosial, peningkatan kesempatan kerja, serta pembangunan ekonomi, kenyataannya masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga menyangkut keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan fasilitas umum lainnya. Salah satu penyebab utama kemiskinan di Indonesia adalah tingginya tingkat pengangguran dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Pertumbuhan jumlah penduduk dan angkatan kerja yang terus meningkat belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan pekerjaan yang memadai. Akibatnya, banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tidak menentu sehingga sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Purwanti, 2024).

Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan yang terbatas sehingga sulit bersaing di dunia kerja. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat hanya mampu memperoleh pekerjaan dengan produktivitas dan pendapatan yang rendah. Rendahnya pendidikan juga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Ketimpangan pembangunan antar wilayah juga menjadi salah satu permasalahan kemiskinan di Indonesia. Pembangunan ekonomi yang lebih terpusat di wilayah perkotaan menyebabkan daerah pedesaan masih mengalami keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang kerja (Prasetyo, 2013). Akibatnya, tingkat kesejahteraan masyarakat antar daerah menjadi tidak merata dan angka kemiskinan di beberapa wilayah masih cukup tinggi. Permasalahan kemiskinan di Indonesia juga dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan

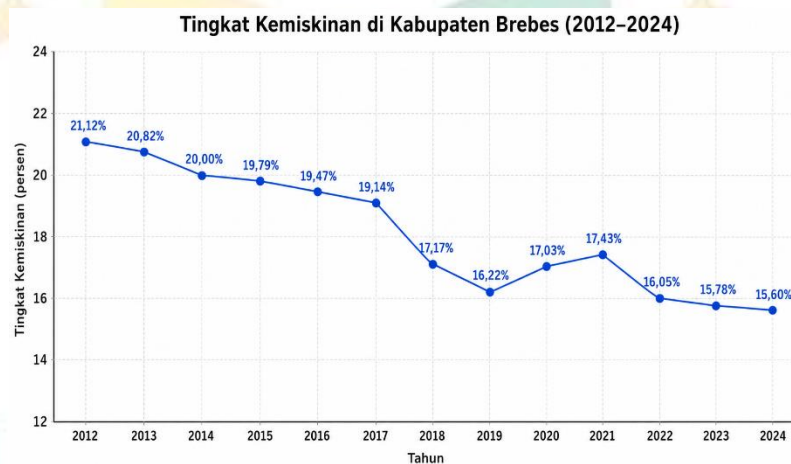
masyarakat terhadap sektor informal dan sektor pertanian tradisional. Sebagian masyarakat masih bekerja sebagai petani, buruh harian, pedagang kecil, dan pekerjaan lain yang memiliki pendapatan tidak tetap. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sangat rentan terhadap perubahan ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi, serta kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi pendapatan mereka.

Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Tengah menghadapi tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Meskipun pertumbuhan ekonomi terus mengalami perkembangan, masih terdapat beberapa daerah di Jawa Tengah yang memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi dibandingkan daerah lainnya. Permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Salah satu faktor utama adalah masih terbatasnya lapangan pekerjaan yang mampu menyerap jumlah angkatan kerja yang terus meningkat setiap tahunnya (BPS, 2023). Banyak masyarakat yang akhirnya bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah dan tidak menentu. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal yang layak.

Selain itu, sebagian besar masyarakat di Jawa Tengah masih bergantung pada sektor pertanian tradisional. Pendapatan masyarakat pada sektor ini cenderung tidak stabil karena dipengaruhi oleh kondisi cuaca, hasil panen, serta fluktuasi harga komoditas pertanian. Ketergantungan terhadap sektor dengan produktivitas rendah tersebut menyebabkan masyarakat lebih rentan mengalami kemiskinan (Lestari, 2021). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jawa Tengah masih berada di atas beberapa provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih perlu ditingkatkan melalui kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan antar daerah.

Saat ini kemiskinan di Jawa Tengah khususnya di kabupaten brebebs, merupakan masalah yang kompleks dan multifaset. Kabupaten brebes yang terletak di jawa tengah memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang khas, sebagian besar penduduknya bergantung pada sector pertanian yang sering kali tidak memberikan upah yang memadai. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di kabupaten brebes mencapai 15,78%. Angka ini menunjukkan bahwa banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Banyak pekerja di sector informal yang terjebak dalam siklus kemiskinan, dimana upah yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (BPS, 2023).

Gambar 1.1
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Brebes



Sumber : BPS Kabupaten Brebes 2012-2024

Berdasarkan data tingkat kemiskinan Kabupaten Brebes tahun 2012–2024, terlihat bahwa angka kemiskinan memang cenderung mengalami penurunan, namun penurunannya berlangsung relatif lambat dan masih berada pada tingkat yang cukup tinggi. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes mencapai 21,12 persen, kemudian menurun secara bertahap hingga menjadi 15,60 persen pada tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan sebesar sekitar 5,52 persen selama periode tersebut, angka kemiskinan di Kabupaten Brebes masih tergolong tinggi dibandingkan beberapa daerah lain di Jawa Tengah.

Penurunan angka kemiskinan dari tahun 2012 hingga 2019 menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat serta adanya pengaruh program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Pada periode tersebut tingkat kemiskinan turun dari 21,12 persen menjadi 16,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat mulai mengalami peningkatan, baik melalui pertumbuhan ekonomi, bantuan sosial, maupun peningkatan kesempatan kerja.

Namun, pada tahun 2020 dan 2021 angka kemiskinan kembali mengalami peningkatan menjadi 17,03 persen dan 17,43 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya gangguan terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi, meningkatnya pengangguran, serta menurunnya pendapatan masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan sehingga jumlah penduduk miskin meningkat. Selain itu, data tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan setelah pandemi berlangsung cukup lambat. Pada tahun 2022 hingga 2024 angka kemiskinan memang kembali menurun menjadi 15,60 persen, tetapi penurunannya tidak terlalu signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan sulit ditekan secara cepat di Kabupaten Brebes.

Permasalahan utama yang dapat dilihat dari data tersebut adalah masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian dan pekerjaan informal dengan pendapatan rendah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tingkat kemiskinan di Brebes masih relative tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang kecil, dan buruh harian yang pendapatannya tidak tetap sehingga rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi (Pratama, 2021). Lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja yang ada sehingga banyak masyarakat usia produktif belum memperoleh pekerjaan tetap. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya risiko kemiskinan.

Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor non-pertanian, luas wilayah, dan kepadatan penduduk menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan di Brebes. Upaya pengentasan kemiskinan memerlukan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi, termasuk upah minimum yang seringkali tidak mencukupi kebutuhan hidup, serta tingkat pendidikan yang masih rendah di sebagian masyarakat (Sari, D. P., & Setiawan, 2023).

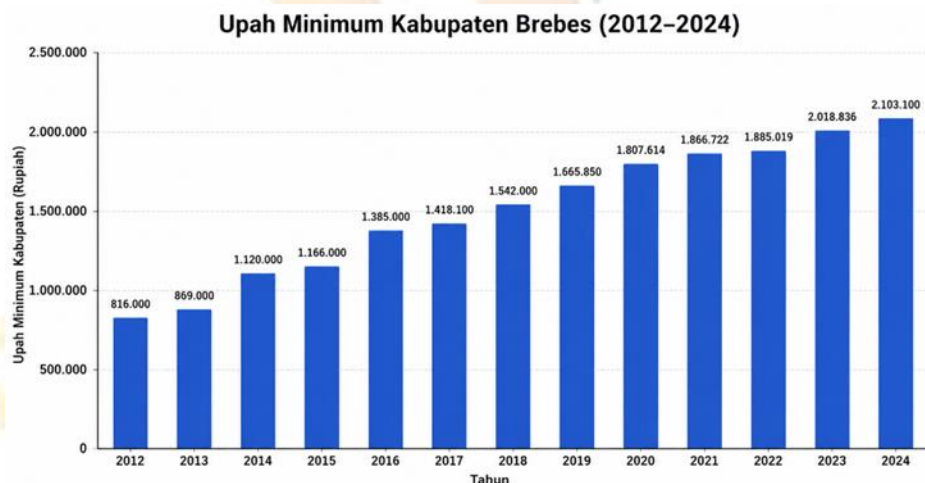
Masalah kemiskinan merupakan isu yang rumit dan melibatkan banyak aspek. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan, langkah-langkah yang diambil perlu bersifat menyeluruh dan mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat, serta dilaksanakan secara terkoordinasi. Salah satu tantangan kemiskinan terjadi di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Brebes, yang tercatat memiliki angka kemiskinan tertinggi di wilayah tersebut yaitu ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan dapat menghalangi pertumbuhan serta perkembangan ekonomi. Selain itu, ada banyak faktor yang menyebabkan Kabupaten Brebes mengalami angka kemiskinan yang sangat tinggi di Jawa Tengah, yaitu 1) Upah minimum; 2) Tingkat pengangguran; 3) Tingkat pendidikan. Seiring berjalannya waktu, kemiskinan pada faktor-faktor tersebut cenderung meningkat (Marhusen et al., 2018).

Keberhasilan pertama ini erat kaitanya dengan berbagai program unggulan yang di terapkan bupati Brebes, Hj Paramitha Widya Kusuma SE MM. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes berorientasi pada penguatan perlindungan sosial sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Beberapa program utama dari Brebes Beres yang saat ini sedang dilaksanakan, antara lain. Program UMKM Naik Kelas, dengan pendampingan usaha kecil hingga akses permodalan berbasis digital. Satu Keluarga Satu Sarjana, dengan pemberian Beasiswa dan bantuan pendidikan hingga ke tingkat sarjana bagi anak dari keluarga agar tidak terjebak dalam siklus kemiskinan. Brebes Sehat, dengan inisiatif memperkuat layanan kesehatan tanpa biaya dan jaminan kesehatan untuk keluarga yang kurang mampu melalui BPJS PBI. Dalam Karya dan Infrastruktur Desa, dengan menyediakan kesempatan kerja langsung melalui pembangunan jalan desa, sistem irigasi, dan fasilitas umum. Tindakan terhadap

Inflasi Daerah, Pemerintah Kabupaten terus melaksanakan pasar murah serta memberikan subsidi untuk bahan pokok guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, tantangan yang ada sangat besar dan memerlukan pendekatan yang lebih terintegritas (Awaludin, 2022).

Upah minimum merupakan instrument yang di tetapkan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan bahwa mereka menerima gaji yang layak. Namun, dalam praktiknya banyak daerah termasuk kabupaten brebes, menetapkan upah minimum yang seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Penelitian oleh (Nurtiyas, 2016) menunjukan bahwa di beberapa daerah, upah minimum yang rendah berkontribusi pada tingginya angka kemiskinan, dimana pekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan perumahan. Upah rendah yang diterima oleh masyarakat berpengaruh pada rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat di suatu daerah sehingga pendapatan tersebut tidak bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Gambar 1.2
Upah Minimum Kabupaten Brebes



Sumber : BPS Kabupaten Brebes 2012-2024

Berdasarkan data Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Brebes tahun 2012–2024, terlihat bahwa UMK mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 UMK Kabupaten Brebes sebesar Rp816.000 dan terus

meningkat hingga mencapai Rp2.103.100 pada tahun 2024. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan menyesuaikan upah dengan kebutuhan hidup masyarakat yang terus meningkat. Peningkatan UMK juga menunjukkan bahwa pemerintah berusaha memberikan perlindungan kepada pekerja agar memperoleh pendapatan yang lebih layak. Meskipun UMK terus meningkat, permasalahan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes masih belum sepenuhnya terselesaikan. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Brebes. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan UMK belum memberikan dampak yang merata terhadap seluruh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Brebes masih bekerja pada sektor informal seperti pertanian, perdagangan kecil, buruh harian, dan usaha mikro yang tidak menerapkan sistem upah sesuai standar UMK (E. Wulandari, 2023). Akibatnya, banyak masyarakat yang pendapatannya masih berada di bawah upah minimum.

Selain itu, struktur ekonomi Kabupaten Brebes yang masih didominasi sektor pertanian tradisional menyebabkan kenaikan UMK kurang dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Sebagian besar petani dan buruh tani memperoleh pendapatan yang bergantung pada hasil panen dan kondisi pasar sehingga penghasilannya tidak tetap (Hidayah, 2021). Ketika harga hasil pertanian menurun atau terjadi gagal panen, pendapatan masyarakat ikut menurun meskipun UMK secara resmi mengalami kenaikan. Permasalahan lain yang muncul dari kenaikan UMK adalah kemampuan perusahaan atau pelaku usaha dalam memenuhi standar upah yang ditetapkan pemerintah. Tidak semua perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah, memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk membayar upah sesuai UMK. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja, membatasi perekrutan pekerja baru, atau lebih memilih menggunakan tenaga kerja tidak tetap untuk menekan biaya produksi. Akibatnya, kenaikan UMK justru dapat mempengaruhi tingkat pengangguran apabila tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja.

Munculnya kebijakan upah minimum dilatarbelakangi oleh kondisi pekerja yang sering menerima upah rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di Kabupaten Brebes, upah minimum yang berlaku disebut Upah Minimum Kabupaten (UMK) Brebes. Penetapan Upah Minimum Kabupaten Brebes dilakukan setiap tahun melalui proses yang melibatkan berbagai pihak. Penetapan UMK tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi berdasarkan kondisi ekonomi daerah, tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kebutuhan hidup masyarakat. Tujuan utama penetapan UMK adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjaga keseimbangan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha (Rohman, 2022). Dalam proses penetapan UMK Brebes, pihak yang memiliki peran penting adalah Dewan Pengupahan Kabupaten Brebes. Dewan Pengupahan merupakan lembaga yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan mengenai besaran upah minimum kepada pemerintah daerah. Dewan ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu: 1. Pemerintah daerah Kabupaten Brebes 2. Perwakilan pengusaha atau asosiasi perusahaan 3. Serikat pekerja atau serikat buruh 4. Akademisi atau pakar ekonomi 5. Badan Pusat Statistik (BPS)

Masing-masing pihak memiliki peran berbeda dalam pembahasan upah minimum. Pemerintah berperan sebagai pengambil kebijakan dan penengah antara pekerja dan pengusaha. Serikat pekerja biasanya mengusulkan kenaikan upah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Sementara itu, pengusaha mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam membayar upah agar kegiatan usaha tetap berjalan dengan baik. Proses penetapan UMK Brebes dimulai dari pengumpulan data ekonomi dan ketenagakerjaan. Data yang digunakan meliputi tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, kondisi pasar kerja, dan kebutuhan hidup layak (KHL). KHL merupakan standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk hidup layak selama satu bulan yang meliputi kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, Badan Pusat Statistik

(BPS) juga memberikan data mengenai kondisi ekonomi daerah seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes. Inflasi digunakan untuk melihat kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendukung kenaikan upah (Aisyay, 2020).

Di Kabupaten Brebes, dana UMK berasal dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, seperti perusahaan industri, pabrik, perdagangan, jasa, maupun usaha lainnya yang mempekerjakan pekerja formal. Pemerintah tidak memberikan dana langsung untuk membayar UMK pekerja, tetapi pemerintah hanya menetapkan standar minimal upah yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Besarnya kemampuan perusahaan dalam membayar UMK dipengaruhi oleh kondisi ekonomi perusahaan itu sendiri. Perusahaan besar dengan keuntungan tinggi biasanya lebih mampu membayar upah sesuai atau bahkan di atas UMK. Namun, perusahaan kecil atau usaha mikro terkadang mengalami kesulitan memenuhi standar UMK karena keterbatasan modal dan pendapatan usaha. Selain itu, UMK juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, dan biaya hidup masyarakat. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat dan biaya hidup masyarakat naik, pemerintah biasanya menaikkan UMK agar daya beli pekerja tetap terjaga. Namun, kenaikan tersebut tetap mempertimbangkan kemampuan perusahaan agar tidak menimbulkan masalah seperti pengurangan tenaga kerja atau meningkatnya pengangguran (Ramadhan, 2022).

Upah yang rendah dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah secara otomatis akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat. Kualitas sumber daya manusia sering dikaitkan oleh keterampilan yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat. Adanya pelatihan kerja serta pendidikan merupakan salah satu factor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang nantinya kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi penentuan besar pendapatan yang diterima masyarakat, apabila factor ini tidak diperhatikan

oleh pemerintah, maka masyarakat miskin akan terjebak dalam lingkaran kemiskinan secara turun temurun (Muliza, 2022).

Selain upah minimum, pendidikan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi kemiskinan. Menurut Mankiw dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pradipta, S. A., & Dewi, 2020) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah bentuk investasi individu, jika pendidikan meningkat maka tingkat kesejahteraan juga akan mengikutinya, hal ini juga akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Salah satu indikator untuk melihat baik atau tidaknya pendidikan di suatu wilayah adalah melalui angka rata-rata lama sekolah. Dalam hal ini rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengidentifikasi jenjang kelulusan di suatu wilayah. Rata-rata sekolah sendiri adalah lamanya pendidikan yang ditempuh setiap individu melalui pendidikan formal. Pendidikan merupakan upaya paling efektif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adanya pendidikan dapat mewujudkan generasi yang cerdas, karena pendidikan adalah tujuan utama dalam mengembangkan sosial dan ekonomi. Semakin tinggi pendidikan pada seseorang, maka pengetahuan dan keterampilan juga akan meningkat sehingga akan mendorong dalam peningkatan produktivitas seseorang. Pendidikan merupakan suatu sarana dalam menghapus kebodohan sekaligus dapat menurunkan angka kemiskinan (Diyana Dwi Utami, 2023).

Gambar 1.3
Tingkat Pendidikan Kabupaten Brebes



Sumber : BPS Kabupaten Brebes 2012-2024

Berdasarkan data tingkat pendidikan Kabupaten Brebes tahun 2012–2024, terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 tingkat pendidikan berada pada angka 5,38 tahun dan meningkat menjadi 6,41 tahun pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Brebes mulai mengalami perkembangan. Namun, meskipun mengalami kenaikan, tingkat pendidikan tersebut masih tergolong rendah karena rata-rata masyarakat hanya menempuh pendidikan sekitar kelas 6 sekolah dasar hingga awal tingkat sekolah menengah pertama. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan di Kabupaten Brebes berlangsung cukup lambat. Selama periode 2012–2024, kenaikan rata-rata lama sekolah hanya sekitar 1 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut menjadi salah satu permasalahan penting karena kualitas pendidikan sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan yang layak.

Rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Brebes dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya kondisi ekonomi masyarakat yang masih terbatas. Sebagian masyarakat berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah sehingga anak-anak sering mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih bekerja lebih awal untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan sekolah. Permasalahan tingkat pendidikan yang masih rendah juga berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Brebes (A. Setiawan, 2020). Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung memiliki keterampilan dan produktivitas yang terbatas sehingga sulit bersaing dalam dunia kerja. Akibatnya, sebagian besar tenaga kerja hanya bekerja pada sektor informal seperti pertanian, buruh harian, dan perdagangan kecil dengan pendapatan yang rendah dan tidak menentu. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Brebes. Masyarakat yang memiliki pendidikan

rendah biasanya lebih sulit memperoleh pekerjaan formal dengan upah yang layak. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi rendah dan meningkatkan risiko kemiskinan (Yuliana, 2021).

Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat di kabupaten Brebes adalah tingginya angka pengangguran, yang erat kaitanya dengan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Brebes mencapai 8,35%, lebih tinggi dari TPT nasional (Statistik, 2024). Ini berarti bahwa dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat lebih dari 8 orang yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran ini didominasi oleh lulusan SMA/SMK dan SMP, menunjukkan adanya mismatch antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, upah minimum di Brebes yang pada tahun 2025 di tetapkan sebesar Rp 2.239.802, berada di urutan ke-30 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, menunjukkan bahwa upah di Brebes relative rendah dibandingkan dengan daerah lain (Kurniawan, H. & Rahman, 2022).

Gambar 1.4
Tingkat Pengangguran Kabupaten Brebes



Sumber : BPS Kabupaten Brebes 2012-2024

Pengangguran terbuka di Kabupaten Brebes masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi daerah karena menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat usia kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Berdasarkan data tahun 2012–2024, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Brebes mengalami fluktuasi dan cenderung berada pada angka yang cukup

tinggi. Pada tahun 2012 tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,22 persen, kemudian meningkat menjadi 9,61 persen pada tahun 2013 dan 9,53 persen pada tahun 2014. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai sehingga banyak masyarakat belum terserap ke dunia kerja. Permasalahan pengangguran terbuka semakin memburuk ketika pandemi Covid-19 terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Data menunjukkan bahwa tingkat pengangguran meningkat tajam menjadi 9,83 persen pada tahun 2020 dan 9,78 persen pada tahun 2021. Pandemi menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat menurun secara drastis karena banyak usaha mengalami penurunan pendapatan, pembatasan aktivitas ekonomi, dan pengurangan tenaga kerja. Banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, atau kehilangan mata pencaharian sehingga jumlah pengangguran meningkat secara signifikan.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Brebes dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Salah satunya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Brebes masih tergolong rendah. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar tenaga kerja hanya memiliki keterampilan dasar sehingga sulit bersaing dalam dunia kerja modern yang membutuhkan kemampuan dan keterampilan tertentu (Hidayat, 2023). Akibatnya, banyak masyarakat hanya bekerja pada sektor informal dengan pendapatan rendah atau bahkan tidak memperoleh pekerjaan sama sekali. Selain itu, struktur ekonomi Kabupaten Brebes yang masih didominasi sektor pertanian tradisional juga menjadi penyebab tingginya pengangguran terbuka. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, buruh tani, dan pekerja informal lainnya yang pekerjaannya sangat bergantung pada musim panen dan kondisi cuaca. Ketika musim panen selesai atau hasil pertanian menurun, banyak tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga meningkatkan jumlah pengangguran.

Permasalahan lainnya adalah terbatasnya sektor industri dan lapangan pekerjaan formal di Kabupaten Brebes. Pertumbuhan industri yang belum berkembang secara optimal menyebabkan penyerapan tenaga kerja masih

rendah. Banyak masyarakat usia produktif kesulitan memperoleh pekerjaan formal yang sesuai dengan keterampilan dan tingkat pendidikan mereka (Arif, 2023). Akibatnya, sebagian masyarakat memilih merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan atau tetap bekerja pada sektor informal dengan pendapatan tidak menentu. Tingginya pengangguran terbuka juga dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara kemampuan tenaga kerja dan kebutuhan pasar kerja. Banyak lulusan sekolah yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja sehingga sulit diterima oleh perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dan pelatihan kerja masih perlu ditingkatkan agar tenaga kerja lebih siap menghadapi persaingan kerja. Pengangguran terbuka memberikan dampak besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Brebes. Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap akan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Selain itu, pengangguran dapat menurunkan daya beli masyarakat, memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan ketimpangan sosial, dan memicu berbagai masalah sosial lainnya (D. Kurniawan, 2023).

Dalam konteks ini, terdapat pemahaman bagaimana upah minimum dan tingkat pendidikan saling berinteraksi dan mempengaruhi kemiskinan di kabupaten brebes. Penelitian yang ada seringkali memisahkan analisis antara upah minimum, pendidikan dan kemiskinan, tanpa mempertimbangkan pengangguran sebagai variabel yang dapat memediasi hubungan tersebut. Misalnya, banyak penelitian menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Namun, tidak banyak yang menjelaskan bagaimana pendidikan yang rendah dapat meningkatkan pengangguran, yang pada gilirannya dapat memperburuk kemiskinan. Umumnya penelitian lebih berfokus pada hubungan langsung antara upah minimum dan kemiskinan atau pendidikan dan kemiskinan. Namun penelitian yang mencakup pengangguran sebagai variabel intervening masih sangat terbatas (Hill, 2018). Sebagian besar studi diluar kabupaten brebes biasanya tidak mempertimbangkan variabel lokal dan kondisi spesifik yang ada di daerah tersebut.

Dengan memasukan pengangguran sebagai variabel intervening, penelitian ini tidak hanya akan menjelaskan hubungan langsung antara upah minimum dan pendidikan terhadap kemiskinan, tetapi juga bagaimana pengangguran dapat memediasi hubungan tersebut. Selain itu, penelitian ini akan dilakukan dalam rentang waktu yang lebih panjang, yaitu dari 2016-2024. Analisis dalam periode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana kebijakan upah minimum dan pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan seiring dengan perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi di Kabupaten Brebes. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi nasional, yang dapat mempengaruhi hasil, sehingga memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pemahaman tentang kemiskinan di Indonesia.

Adanya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh upah minimum dan tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Brebes, serta menganalisis peran pengangguran terbuka sebagai variabel intervening. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan memahami dinamika kemiskinan di Kabupaten Brebes secara lebih mendalam, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

B. Identifikasi Masalah

1. Tingkat upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar para penghasilan rendah, sehingga berdampak terhadap tingkat kemiskinan
2. Meskipun angka partisipasi pendidikan formal meningkat, kualitas pendidikan di Kabupaten Brebes masih menjadi masalah. Banyak lulusan yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
3. Angka pengangguran terbuka yang tinggi, khususnya di kalangan lulusan perguruan tinggi dan pemuda, menunjukkan adanya mismatch antara keterampilan yang dimiliki dan kebutuhan industri.
4. Apa faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan ini, dan sejauh mana pengangguran terbuka berfungsi sebagai variabel intervening dalam pengaruh upah minimum dan pendidikan terhadap kemiskinan.

C. Batasan Masalah

Melihat identifikasi masalah di atas, maka peneliti perlu membatasi permasalahan pada pembahasan Pengaruh upah minimum kabupaten dan tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan melalui pengangguran sebagai variabel intervening. Dalam hal ini peneliti memfokuskan di Kabupaten Brebes pada periode Tahun 2012 - 2024.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di kabupaten Brebes?
2. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di kabupaten Brebes?
3. Apakah upah minimum kabupaten berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan di kabupaten Brebes?

4. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan di kabupaten Brebes?
5. Apakah upah minimum kabupaten dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan dengan pengangguran terbuka di kabupaten Brebes?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hasil analisis pengaruh upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di kabupaten Brebes?
2. Untuk mengetahui hasil analisis pengaruh tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di kabupaten Brebes?
3. Untuk mengetahui hasil analisis pengaruh upah minimum kabupaten berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan di kabupaten Brebes?
4. Untuk mengetahui hasil analisis pengaruh tingkat pendidikan berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan di kabupaten Brebes?
5. Untuk mengetahui hasil analisis pengaruh upah minimum kabupaten dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemiskinan dengan pengangguran terbuka sebagai variabel intervening di kabupaten Brebes?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan di bidang ekonomi pembangunan, khususnya mengenai hubungan antara upah minimum, tingkat pendidikan, pengangguran terbuka dan kemiskinan. Hasil penelitian ini dapat di jadikan acuan untuk penelitian selanjutnya yang mengkaji factor-faktor ekonomi lain yang mempengaruhi kemiskinan

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai efektifitas kebijakan upah minimum dan tingkat pendidikan dalam mengurangi kemiskinan, serta pentingnya mengatasi pengangguran terbuka.
- b. Penelitian ini dapat membantu masyarakat dalam memahami bagaimana

kebijakan upah minimum dan tingkat pendidikan mempengaruhi kesejahteraan mereka dan mendorong mereka untuk mendukung upaya yang dapat mengurangi kemiskinan melalui pengangguran terbuka sebagai variabel intervening.

3. Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian, bahan referensi dalam konferensi atau diskusi akademis di bidang ekonomi dan kebijakan public.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa atau akademis yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan kemiskinan, pengangguran terbuka, tingkat pendidikan atau upah minimum.

G. Sistematika Penulisan

Dari Sistematika penulisan ini merupakan deskripsi tentang urutan – urutan penelitian yang digambarkan secara garis besar dalam bentuk bab per bab, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian secara garis besar yang berkenaan dengan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang pemaparan kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, Teknik analisis data, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian, dan Teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian, objek penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas masalah serta saran – saran tentang hal yang berkaitan dengan penelitian.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON